



TAHUN ANGGARAN 2025

RANCANGAN AKHIR RENJA

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SUKABUMI**

JALAN RAYA CIBOLANG KM.7 NO.33 TELP. (0266) 248916
WEBSITE: DKUKM.SUKABUMIKAB.GO.ID
EMAIL: INFO@DKUKM.SUKABUMIKAB.GO.ID
SUKABUMI - 43352



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi dapat menyelesaikan dokumen rancangan awal rencana kerja Tahun 2025 ini.

Penyusunan dokumen rancangan awal rencana kerja tahun 2025 ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2025 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025. Pada penyusunan dokumen rancangan awal ini RKPD tahun 2025 ini telah dilakukan penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD.

Diharapkan rancangan awal rencana kerja ini dapat bermanfaat dalam pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi serta membantu mewujudkan misi Kabupaten Sukabumi yaitu ***Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi ekonomi lokal melalui sektor agribisnis, pariwisata, dan industri berwawasan lingkungan*** di Kabupaten Sukabumi.

Sukabumi, 07 Oktober 2024

Kepala Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Sukabumi,





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR ISI TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	12
2.1.1. Penetapan Indikator Kinerja	58
2.1.2. Capaian Analisis Kinerja	68
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	74
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	76
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	80
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	106
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	107
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	107
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM	108
3.3. Program dan Kegiatan	110
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	119
BAB V PENUTUP	162



DAFTAR ISI TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2023	13
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2023	26
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2023	35
Tabel 2.4	Penetapan Indikator Kinerja	59
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Skpd Tahun 2023	68
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	69
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	73
Tabel 2.8	Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	74
Tabel 2.9	Matrik Pemutakhiran Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025	78
Tabel 2.10	Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun Anggaran 2025	79
Tabel 2.11	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025	106
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja Utama (Iku) Tahun Anggaran 2025	107
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2026	108
Tabel 3.3	Proyek Prioritas	119
Tabel 3.4	Usulan Musrenbang Kecamatan	120
Tabel 3.5	Pemetaan Terkait Dukungan Tematik Kabupaten Sukabumi Ta. 2025	121
Tabel 4.1	Rancangan Akhir Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Opd)	122



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen rencana kerja perangkat daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (RKPD). Oleh karena itu, penyusunan rencana kerja perangkat daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (RKPD), dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan kerja perangkat daerah (Renja PD) tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja (Renja) SKPD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Adapun salah satu dokumen perencanaan tersebut yaitu Dokumen Renja yang mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari renstra SKPD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). Renja SKPD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.



2. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi Renja SKPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD terhadap Renstra SKPD; evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD.
5. Program/kegiatan dalam RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
6. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan rancangan awal rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 juga masih berpedoman pada RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025. Rencana kerja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi.

Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 adalah merupakan salah satu tahapan dan sekaligus menjadi bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2025 dalam upaya Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk membangun suatu sistem manajemen pemerintahan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.



Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja 1 (satu) tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025.

Adapun Rencana Kerja yang disusun oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memuat:

- 1) Program dan kegiatan;
- 2) Lokasi kegiatan;
- 3) Indikator kinerja;
- 4) Kelompok sasaran;
- 5) Pagu indikatif dan prakiraan maju

Dokumen rancangan awal rencana kerja ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan dan sistem manajemen pemerintahan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, serta guna mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Sukabumi yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri”***.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025;



33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026;
35. Peraturan Bupati Sukabumi No. 81 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi.
36. Peraturan Bupati Sukabumi No. 8 Tahun 2024 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan awal rencana kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai upaya memenuhi kebutuhan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi yang sesuai dengan perkembangan serta perubahan situasi dan kondisi yang terjadi dalam waktu berjalan, serta sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025.

Rancangan awal rencana kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk :

- a. Memberikan arah dalam pelaksanaan prioritas program dan kegiatan dalam pelayanan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk pembangunan masyarakat khususnya di Kabupaten Sukabumi.
- b. Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik.
- c. Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.
- d. Menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan serta program Dinas kedalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2025.
- e. Sebagai salah satu pedoman bagi unsur pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan tugas



- pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- f. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan awal rencana kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun sistematika adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.2 LATAR BELAKANG

2.1 LANDASAN HUKUM

3.1 MAKSUD DAN TUJUAN

4.1 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pemetaan Terkait Dukungan Tematik Kabupaten Sukabumi Ta. 2025

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun Anggaran 2023)

Realisasi anggaran pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 sebesar Rp. 9.505.377.019,- dari Anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 10.031.037.087,- atau sebesar 94.75% untuk Belanja Langsung Kegiatan. Gaji dan Tambahan penghasilan (APBD Kabupaten) sebesar Rp. 4.020.511.726,- dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 4.074.269.467,- atau terserap 98.6%. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.1



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja PD s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan sd tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH										
<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>										
2.17.01.2.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2	2	100%	100%	100%	
2.17.01.2.01.02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD			1	1	100%	100%	100%	
2.17.01.2.01.03	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD			1	1	100%	100%	100%	



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja PD s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan sd tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.01.04	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD			1	1	100%	100%	100%	
2.17.01.2.01.05	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD			1	1	100%	100%	100%	
2.17.01.2.01.06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3	3	100%	100%	100%	
2.17.01.2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3	3	100%	100%	100%	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja PD s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan sd tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			25	25	100%	100%	100%	
2.17.01.2.02.04	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1	1	100%	100%	100%	
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1	1	100%	100%	100%	
2.17.01.2.02.07	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			1	1	100%	100%	100%	
2.17.01.2.02.07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			1	1	100%	100%	100%	



Kode Rekening	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja PD s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan sd tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.02.08	- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1	1	100%	100%	100%	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1	1	100%	100%	100%	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1	1	100%	100%	100%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			2	2	100%	100%	100%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
2.17.01.2.05.01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1	1	100%	100%	100%	



Kode Rekening	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja PD s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan sd tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			1	1	100%	100%	100%	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1	1	100%	100%	100%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			70	70	100%	100%	100%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah										
2.17.01.2.06.01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2	2	100%	100%	100%	
2.17.01.2.06.02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2	2	100%	100%	100%	



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja PD s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan sd tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.06.03	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1	1	100%	100%	100%	
2.17.01.2.06.04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3	3	100%	100%	100%	
2.17.01.2.06.05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2	2	100%	100%	100%	
2.17.01.2.06.06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan			2	2	100%	100%	100%	
2.17.01.2.06.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1	1	100%	100%	100%	
2.17.01.2.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2	2	100%	100%	100%	



Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja PD s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan sd tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.06.09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1	1	100%	100%	100%	
2.17.01.2.06.11	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1	1	100%	100%	100%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
2.17.01.2.07.05	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			52	52	100%	100%	100%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
2.17.01.2.08.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4	4	100%	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Peralatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa			1	1	100%	100%	100%	



Kode Rekening	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja PD s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan sd tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
2.17.01.2.08.04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1	1	100%	100%	100%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
2.17.01.2.09.01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			5	5	100%	100%	100%	
2.17.01.2.09.02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			11	11	100%	100%	100%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			6	6	100%	100%	100%	



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja PD s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan sd tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.09.02	'- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3	3	100%	100%	100%	
2.17.01.2.09.02	'- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			5	5	100%	100%	100%	
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM										
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota										
	'- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi SimpanPinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			7	7	100%	100%	100%	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI										



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja PD s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan sd tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota										
2.17.03.2.01.01	- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			50	50	100%	100%	100%	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI										
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan			80	80	100%	100%	100%	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN										
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota										



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja PD s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan sd tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.05.2.01.01	- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			150	150	100%	100%	100%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI										
<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>										
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			7	7	100%	100%	100%	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			60	60	100%	100%	100%	



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja PD s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan sd tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)										
<i>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>										
2.17.07.2.01.01	- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Usaha yangberpotensi dan berkembang			490	490	100%	100%	100%	
2.17.07.2.01.02	- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro			32	32	100%	100%	100%	
2.17.07.2.01.03	- Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan			120	120	100%	100%	100%	
2.17.07.2.01.04	- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			360	360	100%	100%	100%	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam			85	85	100%	100%	100%	



Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja PD s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan sd tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pemberdayaan Usaha Mikro								
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan			150	150	100%	100%	100%	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM										
<i>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>										
2.17.08.2.01.01	- Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			150	150	100%	100%	100%	



Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi

KODE REK	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI FISIK DAN KEUANGAN				FISIK	TARGET	KET.
				SPMU	%	SPJ	%	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	6.973.829.189	10.031.037.087	9.505.377.019	94,75	9.505.377.019	94,75	94,75	100,00	
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	24.047.000	6.570.635.887	55.805.800	99,98	55.805.800	99,98	99,98	100,00	
2.17.01.2.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.844.000	22.196.000	22.195.800	100,0	22.195.800	100,0	100,0	100,00	
2.17.01.2.01.02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.104.000	5.000.000	5.000.000	100	5.000.000	100	100	100,00	
2.17.01.2.01.03	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000	5.000.000	5.000.000	100	5.000.000	100	100	100,00	
2.17.01.2.01.04	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.099.000	5.000.000	5.000.000	100	5.000.000	100	100	100,00	
2.17.01.2.01.05	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.000.000	5.000.000	5.000.000	100	5.000.000	100	100	100,00	



KODE REK	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI FISIK DAN KEUANGAN				FISIK	TARGET	KET.
				SPMU	%	SPJ	%	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.17.01.2.01.06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	8.620.000	8.610.000	100	8.610.000	100	100	100,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.508.128.456	4.047.269.467	4.020.511.726	98,7	4.020.511.726	98,7	98,7	100,00	
2.17.01.2.02.04	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.062.703.706	4.034.541.067	3.980.848.326	98,7	3.980.848.326	98,7	98,7	100,00	
2.17.01.2.02.05	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000	5.828.400	5.813.400	99,7	5.813.400	99,7	99,7	100,00	
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000	5.000.000	4.995.000	99,9	4.995.000	99,9	99,9	100,00	
2.17.01.2.02.08	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.424.750	5.000.000	4.985.000	99,7	4.985.000	99,7	99,7	100,00	
2.17.01.2.02.04	- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	18.900.000	18.890.000	99,9	18.890.000	99,9	99,9	100,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		32.999.800	32.999.800	100,0	32.999.800	100,0	100,0		
2.17.01.2.02.04	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	100,0	100,00	
2.17.01.2.02.04	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		7.999.800	7.999.800	100,0	7.999.800	100,0	100,0	100,00	



KODE REK	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI FISIK DAN KEUANGAN				FISIK	TARGET	KET.
				SPMU	%	SPJ	%	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.17.01.2.02.04	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		20.000.000	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	100,0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.000.000	26.320.400	26.320.400	100,0	26.320.400	100,0	100,0	100,00	
2.17.01.2.05.01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	100,0	100,00	
2.17.01.2.05.01	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	100,0	100,00	
2.17.01.2.05.01	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		6.400.000	6.400.000	100,0	6.400.000	100,0	100,0	100,00	
2.17.01.2.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		9.920.400	9.920.400	100,0	9.920.400	100,0	100,0	100,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	295.523.425	596.241.700	584.111.857	98,0	584.111.857	98,0	98,0	100,00	
2.17.01.2.06.01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.298.800	9.634.400	9.634.400	100,0	9.634.400	100,0	100,0	100,00	
2.17.01.2.06.02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.200.000	76.718.000	75.730.000	98,7	75.730.000	98,7	98,7	100,00	
2.17.01.2.06.03	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.745.000	10.316.400	10.316.400	100,0	10.316.400	100,0	100,0	100,00	
2.17.01.2.06.04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	145.012.625	141.165.000	132.051.000	93,5	132.051.000	93,5	93,5	100,00	
2.17.01.2.06.05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.167.000	24.433.100	22.890.600	93,7	22.890.600	93,7	93,7	100,00	



KODE REK	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI FISIK DAN KEUANGAN				FISIK	TARGET	KET.
				SPMU	%	SPJ	%	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.17.01.2.06.06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	58.500.000	248.000.000	248.000.000	100,0	248.000.000	100,0	100,0	100,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		4.999.800	4.999.800	100,0	4.999.800	100,0	100,0	100,00	
2.17.01.2.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.600.000	70.975.000	70.494.657	99,3	70.494.657	99,3	99,3	100,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		5.000.000	4.995.000	99,9	4.995.000	99,9	99,9	100,00	
2.17.01.2.06.11	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	19.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	100,0	100,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.200.000	30.365.000	30.000.000	98,8	30.000.000	98,8	98,8	100,00	
2.17.01.2.07.05	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.200.000	30.365.000	30.000.000	98,8	30.000.000	98,8	98,8	100,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.120.426.800	1.243.276.800	1.241.048.695	99,8	1.241.048.695	99,8	99,8	100,00	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.200.000	67.250.000	65.364.495	97,2	65.364.495	97,2	97,2	100,00	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.038.226.800	50.000.000	49.670.000	99,3	49.670.000	99,3	99,3	100,00	



KODE REK	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI FISIK DAN KEUANGAN				FISIK	TARGET	KET.
				SPMU	%	SPJ	%	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.126.026.800	1.126.014.200	100,0	1.126.014.200	100,0	100,0	100,0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392.503.508	511.346.720	493.070.368	96,4	493.070.368	96,4	96,4	100,00	
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	210.010.000	300.165.000	287.737.500	95,9	287.737.500	95,9	95,9	100,00	
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.062.400	115.900.000	111.502.500	96,2	111.502.500	96,2	96,2	100,00	
2.17.01.2.09.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.931.108	4.200.000	4.200.000	100,0	4.200.000	100,0	100,0	100,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		87.581.720	86.130.368	98,3	86.130.368	98,3	98,3		
2.17.01.2.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.500.000	3.500.000	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	100,0	100,00	
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	43.758.000	75.170.000	75.136.000	100,00	75.136.000	100,00	100,00	100,00	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah	43.758.000	75.170.000	75.136.000	100,00	75.136.000	100,00	100,00	100,00	



KODE REK	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI FISIK DAN KEUANGAN				FISIK	TARGET	KET.
				SPMU	%	SPJ	%	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota									
2.17.03.2.01.01	- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	43.758.000	75.170.000	75.136.000	100,00	75.136.000	100,00	100,00	100,00	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	42.750.000	87.310.000	87.140.000	100,00	87.140.000	100,00	100,00	100,00	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	42.750.000	87.310.000	87.140.000	100,00	87.140.000	100,00	100,00	100,00	
2.17.03.2.01.01	- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	42.750.000	87.310.000	87.140.000	100,00	87.140.000	100,00	100,00	100,00	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		52.520.000	52.475.000	99,9	52.475.000	99,9	99,9		
2.17.03.2.01.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota		52.520.000	52.475.000	99,9	52.475.000	99,9	99,9		



KODE REK	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI FISIK DAN KEUANGAN				FISIK	TARGET	KET.
				SPMU	%	SPJ	%	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.17.03.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		52.520.000	52.475.000	99,9	52.475.000	99,9	99,9		
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	165.327.750	301.988.000	301.970.500	99,90	301.970.500	99,90	99,90	100,00	
	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>165.327.750</i>	<i>301.988.000</i>	<i>301.970.500</i>	99,90	<i>301.970.500</i>	99,90	99,90	100,00	
2.17.05.2.01.01	- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	165.327.750	301.988.000	301.970.500	99,90	301.970.500	99,90	99,90	100,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	46.913.750	46.913.750	46.913.750	99,8	46.913.750	99,8	99,8	100,00	
	<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>46.913.750</i>	<i>200.012.000</i>	<i>199.687.000</i>	99,8	<i>199.687.000</i>	99,8	99,8	100,00	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	46.913.750	200.012.000	199.687.000	99,8	199.687.000	99,8	99,8	100,00	
2.17.06.2.01.01	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga		160.900.000	160.575.000	100,0	160.575.000	100,0	100,0		



KODE REK	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI FISIK DAN KEUANGAN				FISIK	TARGET	KET.
				SPMU	%	SPJ	%	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya									
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	630.512.500	2.118.401.200	1.682.863.300	79,4	1.682.863.300	79,4	79,4	100,00	
	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	630.512.500	2.118.401.200	1.682.863.300	79,4	1.682.863.300	79,4	79,4	100,00	
2.17.07.2.01.01	- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	7.060.000	200.000.000	199.600.000	99,8	199.600.000	99,8	99,8	100,00	
2.17.07.2.01.02	- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	12.932.500	75.000.000	75.000.000	100,0	75.000.000	100,0	100,0	100,00	
2.17.07.2.01.03	- Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	14.340.000	75.000.000	75.000.000	100,0	75.000.000	100,0	100,0	100,00	
2.17.07.2.01.04	- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	100.260.000	1.179.031.200	746.543.300	63,3	746.543.300	63,3	63,3	100,00	
2.17.07.2.01.03	- Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	95.120.000	120.000.000	118.500.000	98,8	118.500.000	98,8	98,8	100,00	
2.17.07.2.01.04	- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	400.800.000	469.370.000	468.220.000	99,8	468.220.000	99,8	99,8	100,00	



KODE REK	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI FISIK DAN KEUANGAN				FISIK	TARGET	KET.
				SPMU	%	SPJ	%	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	280.000.000	625.000.000	622.236.573	99,6	622.236.573	99,6	99,6	100,00	
	<i>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>	<i>827.758.000</i>	<i>625.000.000</i>	<i>622.236.573</i>	<i>99,6</i>	<i>622.236.573</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>	100,00	
2.17.08.2.01.01	- Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	827.758.000	625.000.000	622.236.573	99,6	622.236.573	99,6	99,6	100,00	



Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat SKPD pada tahun 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	Unit PD Penanggungjawab	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp. (Setelah Perubahan)	I		II		III		IV					
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K					Rp.
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 6+12	14=13/5*100%	15							



1	Meningkatkan Skala Usaha Pelaku Ekonomi Mikro	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100	%	20.775.000,00	100	%	9.202.053,27	100	%	9.455.816,93	10.031,087	200	1.917.897,99	28	2.607,576	204	1.934,827	03	3.045,076	94,76	9.505.377,01	194,76	18.707,490	38,95	3.741,486,05
1		<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100	%	146.000,000	100	%	36.997,00	100	%	52.196,00	55.816,00	350	18.270,00	14%	7.145,00	45%	23.290,800	013	7.100,00	99,8	55.805,80	199,98	92.800,00	400	18.560,560
1		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen							22.196,00	22.196,00	15	3.270,00	0%	-	77,47	17.195,800	7,79	1.730,00	100,00	22.195,80				
2		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen							5.000,00	5.000,00	10	5.000,00	0%	-	-	-	-	-	100,00	5.000,00				

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Sukabumi



	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	67	Orang						10.000,400	9.920,400	-	-	4%	450.000	24,400	2.440,400	71	7.030,000	100,000	9.920,400					
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	100	%	1.190,000	100	%	383,430	100	%	534,310	596,241,700	33,98	181,570	33%	177,055,100	16	87,752,957	23	137,726,600	97,797	584,111,857	197,97	967,544,800	39,59	193,508,961,40
13	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket						5.004,900	9.634,400	-	-	100%	5.004,900	-	-	48	4.629,500	100,000	9.634,400					
14	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket						68,500,000	76,718,000	-	-	99%	67,650,000	-	-	11	8,080,000	98,711	75,730,000					
15	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket						4,952,400	10,316,400	-	-	97%	4,802,400	3,03	150,000	52	5,364,000	100,000	10,316,400					



	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Do ku me n															9 9, 9 0	4.9 95. 000						
2 0	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Do ku me n															1 0 0, 0 0	5.0 00. 000						
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	1 0 0	%	1.34 7.00 0.00 0	1 0 0	%	41. 702 .00 0	1 0 0	%	14. 000 .00 0	30.3 65.0 00	- -	9 9 %	13.8 50.0 00	- -	5 3	16.1 50.0 00	2 1 4, 2 9	30. 000 .00 0	3 1 4, 2 9	71.7 02.0 00,0 0	6 2 , 8 6	14.3 40.4 00,0 0		
2 1	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Uni t															9 8, 8 0	30. 000 .00 0						
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan	1 0 0	%	2.94 0.00 0.00 0	1 0 0	%	1.1 73. 105 0	1 0 0	%	1.1 69. 926 0	1.24 3.27 6.80 0	2 3 ,	271 .76 0.0 82	3 1 %	358. 404. 029	2 8	324. 184. 078	2 3	286. 700. 506	1 0 6,	1.2 41. 048	2 0 6,	2.41 4.15 3.83 6,00	4 1 ,	482. 830. 767, 20



8	- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	2	%	364.000.000	1	%	42.750.000	2	%	87.310.000	87.310.000	7,89	6.890.000	33%	28.690.000	35	30.620.000	24	20.940.000	99,81	87.140.000	100,81	129.890.000	20,16	25.978.000	
29	- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Unit Usaha	364.000.000			87.310.000	87.310.000	8	6.890.000	33%	28.690.000	35,07	30.620.000	24	20.940.000	99,81	87.140.000								
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATA	Persentase KSP/USP Koperasi yang	5	%	100.	1	%	-	5	%	52.520	52.5	37	19.705	13%	6.96	42	22.5	6	3.29	9	52.	100	52.4	20	10.495.0	



		berpredikat cukup sehat		000.					.00	20.0	,	.00		5.00	,	15.0		0.00	9,	475	4,	75.0	,	00,0	
				000					0	00	5	0		0	8	00		0	9	.00	9	00	9	0	
9	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5	%	100.000.000	1	%	-	5	%	52.520.000	52.520.00	37,52	19.705.000	13%	6.965.00	43	22.515.00	6	3.290.00	99,91	52.475.00	100,91	52.475.00	20,18	10.495.00
30	- Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah	80	Unit Usaha	100.000.000					52.520.000	52.520.00	38	19.705.000	13%	6.965.00	487	22.515.00	6	3.290.00	99,91	52.475.00					



Rata-rata Capaian Kinerja (%)	20,28	1.917,799,4,00	27,58	2.607,576,8,00	20,46	1.934,827,227,00	0,30	3.045,076,030,00
Predikat Kinerja								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja: SDM yang memadai, Anggaran yang mencukupi								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja: 1. Adanya bebarapa pergeseran sub kegiatan sehingga menghambat pencairan anggaran, 2. Adanya ketidaksesuaian Standar Harga sistem dengan Realcost, sehingga ada beberapa anggaran rincian belanja yang tersisa, 3. Keterlambatan pencairan Anggaran Bankeu provinsi dari rencana awal untuk 6 bulan, karena adanya bebrapa revisi sehingga baru dicairkan di triwulan IV bulan Desember								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Lebih mematangkan rencana kegiatan sehingga tidak terjadi pergeseran berulang								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya*):								



2.1.1 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan atau aktivitas yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.



Tabel 2.4
Penetapan Indikator Kinerja

Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2025	Kegiatan	Sub Kegiatan	masukan (inputs)	keluaran (outputs)	hasil (outcomes)	manfaat (benefits)	dampak (impacts)
SS11. Meningkatkan skala usaha pelaku ekonomi	Persentase pelaku usaha ekonomi naik kelas		%	2,5							
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Tingkat Layanan Permohonan Izin KSP	%	100	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana yang dibutuhkan	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam yang terverifikasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/Kota	Meningkatnya Wawasan, pengetahuan dan pemahaman SDM Koperasi tentang tata cara penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi	- Peningkatan Koperasi yang bankable - Peningkatan legalitas izin usaha KSP/USP Koperasi sesuai peraturan dan perundang-undangan
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Akuntabel	%	4	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Dana yang dibutuhkan	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	1. Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan pemahaman SDM Koperasi tentang penguatan kelembagaan Koperasi 2. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan	1. Pertumbuhan koperasi yang akuntabel 2. Peningkatan Kapasitas dan daya saing koperasi



Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2025	Kegiatan	Sub Kegiatan	masukan (inputs)	keluaran (outputs)	hasil (outcomes)	manfaat (benefits)	dampak (impacts)
									Kabupaten/ Kota	tentang kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan	
						Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dana yang dibutuhkan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya wawasan pengetahuan dan pemahaman SDM Koperasi tentang pengawasan dan pemeriksaan koperasi Meningkatnya wawasan dan pengetahuan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> Pertumbuhan koperasi yang akuntable Peningkatan wawasan dan pengetahuan para pengurus koperasi tentang pemeriksaan dan pengawasan koperasi
	PROGRAM PENILAIAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan KSP/USP Koperasi yang berpredikat cukup sehat	%	5	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana yang dibutuhkan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya wawasan pengetahuan dan pemahaman SDM Koperasi tentang penilaian Kesehatan Koperasi	Peningkatan pertumbuhan kinerja pengelolaan koperasi yang sehat dan mandiri dan meningkatnya kepercayaan diri anggota sehingga berdaya saing dengan Lembaga lainnya
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan						Dana yang dibutuhkan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya	Meningkatnya wawasan pengetahuan dan pemahaman SDM Koperasi tentang penilaian Kesehatan Koperasi	Peningkatan pertumbuhan kinerja pengelolaan koperasi yang sehat dan mandiri dan meningkatnya kepercayaan diri anggota sehingga berdaya saing dengan Lembaga lainnya	



Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2025	Kegiatan	Sub Kegiatan	masukan (inputs)	keluaran (outputs)	hasil (outcomes)	manfaat (benefits)	dampak (impacts)
									dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Koperasi	%	1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dana yang dibutuhkan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang telah mengikuti latihan perkoperasian untuk koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	1) Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan SDM koperasi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya 2) Peningkatan kemampuan manajerial dan operasional SDM Koperasi 3) Pengurus dan/ Pengawas Koperasi di Kabupaten Sukabumi tersertifikasi BNSP 4) Peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang mengatur perkoperasian	1) Pertumbuhan ekonomi koperasi 2) Peningkatan kesejahteraan anggota 3) Peningkatan kapasitas dan daya saing koperasi 4) Peningkatan kepercayaan publik



Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2025	Kegiatan	Sub Kegiatan	masukan (inputs)	keluaran (outputs)	hasil (outcomes)	manfaat (benefits)	dampak (impacts)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Presentase Koperasi yang berkualitas	%	4	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Dana yang dibutuhkan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran untuk koperasi dengan wilayah yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	1) Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan keluarga tentang peluang ekonomi yang tersedia melalui koperasi membantu yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka 2) Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda dalam kegiatan ekonomi berbasis koperasi	1) Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga 2) Stabilitas Ekonomi Lokal 3) Kemandirian Ekonomi 2) Peningkatan partisipasi keluarga yang bergabung dan aktif dalam kegiatan koperasi
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi						Dana yang dibutuhkan	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran untuk koperasi dengan wilayah yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	1) Peningkatan Pengetahuan kelompok masyarakat tentang dasar-dasar koperasi, prinsip-prinsip, dan manfaat koperasi. 2) Pemahaman yang lebih baik tentang cara mendirikan dan mengelola koperasi dengan efektif. 3) Mendorong lebih banyak kelompok masyarakat untuk membentuk dan menjalankan koperasi.	1) Peningkatan kesejahteraan ekonomi 2) Penguatan ekonomi lokal 3) Pemberdayaan kelompok masyarakat	



Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2025	Kegiatan	Sub Kegiatan	masukan (inputs)	keluaran (outputs)	hasil (outcomes)	manfaat (benefits)	dampak (impacts)
						Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dana yang dibutuhkan	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran untuk koperasi dengan wilayah yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	1) Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengurus dalam kemitraan koperasi 2) Peningkatan dan perluasan akses pasar koperasi 3) Peningkatan jaringan dan kolaborasi antar koperasi serta antara koperasi dengan mitra usaha lainnya 4) Peningkatan pendapatan koperasi	1) Penguatan ekonomi lokal 2) Pengembangan usaha koperasi melalui kemitraan yang berkelanjutan 3) Peningkatan citra positif koperasi di mata stakeholder dan masyarakat
						Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dana yang dibutuhkan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran untuk koperasi dengan wilayah yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	1) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk koperasi 2) Meningkatkan daya saing produk koperasi 3) Memperluas akses pasar koperasi 4) Mempermudah akses pembiayaan koperasi	1) Peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota 2) Penguatan ekonomi lokal 3) Pengembangan usaha berkelanjutan 4) Inovasi dan peningkatan skala usaha koperasi



Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2025	Kegiatan	Sub Kegiatan	masukan (inputs)	keluaran (outputs)	hasil (outcomes)	manfaat (benefits)	dampak (impacts)
						Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dana yang dibutuhkan	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran untuk koperasi dengan wilayah yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	1) Peningkatan akuntabilitas dengan pelaporan yang teratur dan transparan 2) Pemenuhan regulasi yang berlaku 3) Membantu pengurus koperasi dalam pengambilan keputusan yang lebih baik 4) Peningkatan transparansi keuangan terhadap anggota	1) Peningkatan kredibilitas dan profesionalisme koperasi 2) Peningkatan kepercayaan publik terhadap koperasi 3) Meningkatkan peluang untuk mendapatkan kemitraan dan dukungan finansial dari pihak eksternal. 4) Peningkatan kualitas layanan kepada anggota
						Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Dana yang dibutuhkan	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran untuk koperasi dengan wilayah yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	1) Peningkatan kapasitas anggota koperasi 2) Penguatan jaringan dan kemitraan koperasi 3) Peningkatan visibilitas produk koperasi melalui penyusunan katalog koperasi 4) Peningkatan legalitas dan kepatuhan koperasi melalui sertifikat NIK 5) Akses ke fasilitas dan layanan melalui sertifikat NIK	1) Peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi 2) Pemberdayaan masyarakat 3) Peningkatan kepercayaan publik koperasi 4) Kolaborasi dan kemitraan 5) Peningkatan akses pembiayaan



Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2025	Kegiatan	Sub Kegiatan	masukan (inputs)	keluaran (outputs)	hasil (outcomes)	manfaat (benefits)	dampak (impacts)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi dari sisi akses modal dan pemasaran	%	10	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dana yang dibutuhkan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Menambah Pengetahuan Pelaku Usaha Tentang Kemitraan	Memperluas Jaringan Pemasaran
						Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dana yang dibutuhkan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Terasilitasi dari Sisi Akses Modal dan Pemasaran	Menambah Pengetahuan tentang Perizinan Usaha Mikro	Mendapatkan Legalitas Usaha
						Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana yang dibutuhkan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Terasilitasi dari Sisi Akses Modal dan Pemasaran	Menambah Pengetahuan Permodalan dan Pemasaran	Mengetahui Akses Permodalan dan Pemasaran
						Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan usaha Mikro	Dana yang dibutuhkan	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Terasilitasi dari Sisi Akses Modal dan Pemasaran	Menambah Jangkauan Pemasaran dan Perluasan Akses Pemasaran	Memperoleh Akses Pemasaran dan Permodalan
						Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Dana yang dibutuhkan	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitas	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Terasilitasi dari Sisi Akses Modal dan Pemasaran	Menambah Pengetahuan tentang HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)	Mendapatkan Fasilitas HAKI



Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2025	Kegiatan	Sub Kegiatan	masukan (inputs)	keluaran (outputs)	hasil (outcomes)	manfaat (benefits)	dampak (impacts)
						Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Dana yang dibutuhkan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Terfasilitasi dari Sisi Akses Modal dan Pemasaran	Menambah Pengetahuan tentang Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Memperluas Akses Pemasaran dan Menambah Penghasilan
						Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Dana yang dibutuhkan	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Terfasilitasi dari Sisi Akses Modal dan Pemasaran	Terverifikasi nya data Usaha Mikro , Memudahkan arsip database untuk kebutuhan mendatang	Mengelompokan data Usaha sesuai Kebutuhan Pelaku Usaha
						Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Dana yang dibutuhkan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Terfasilitasi dari Sisi Akses Modal dan Pemasaran	Meningkatkan Pengetahuan tentang langkah langkah produksi usaha mikro	Meningkatkan Produksi dan Meningkatkan Income
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	3,1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dana yang dibutuhkan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	Menambah Lapangan Pekerjaan	Memberdayakan Masyarakat sekitar dan menambah tempat usaha



2.1.2 Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dan target kinerja yang telah ditetapkan.



Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran SKPD Tahun 2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2023		Realisasi Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (%)		Keterangan
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
2	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
2.17	Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Tingkat Layanan Permohonan Izin KSP	%	100	75.170.000	100	75.136.000	100	100	Tergantung Permohonan
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Akuntabel	%	2	87.310.000	2	87.140.000	100	99.8	
	Program Penilaian KSP/USP Koperasi	Persentase Peningkatan KSP/USP Koperasi yang berpredikat Cukup Sehat	%	5	52.520.000	3	57.475.000	63	99.9	Tidak ada anggaran
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Kapasitas Koperasi	%	1	301.988.000	8,2	304.970.500	788	100	Hibah
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	%	2	200.012.000	2	199.687.000	100	99.8	Sisa Penawaran
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapatkan Akses Permodalan Dan Pemasaran	%	5	2.118.401.200	5,5	1.682.863.300	107	79.4	Keterlambatan pencairan Anggaran BANKEU Provinsi dari rencana awal untuk 6 bulan
	Program Pengembangan UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	%	2.11	625.000.000	3,3	622.236.573	156	99.6	Sisa penawaran kontrak EO



Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	RENSTRA 2023		ANGGARAN 2023		REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		Keterangan
					Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
					Target		Target		Target		Target		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	37	100	55.816.000	100	55.805.800	100	100	-
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	5517	100	4.074.269.467	100	4.020.511.726	100	99,51	-
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang	%	100	100	24	100	32.999.800	100	32.999.800	100	100	-



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	RENSTRA 2023		ANGGARAN 2023		REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		Keterangan
					Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
					Target		Target		Target		Target		
		tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan											
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	24	100	26.320.400	100	26.320.400	100	100	
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	393	100	596.241.700	97,61	584.111.857	97,61	97,61	
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	42	100	30.365.000	98,82	30.365.000	98,82	98,82	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	RENSTRA 2023		ANGGARAN 2023		REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		Keterangan
					Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
					Target		Target		Target		Target		
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	1200	100	1.243.276.800	97,77	1.241.048.695	97,77	97,77	
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	440	100	511.346.720	95,11	493.070.368	95,11	95,11	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Tingkat Layanan Permohonan Izin KSP	%	NA	100	80	100	75.136.000	100	75.136.000	100	100	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Akuntabel	%	1	2	433	2	87.140.000	2	87.140.000	100	99.8	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan KSP/USP Koperasi yang berpredikat cukup sehat	%	NA	5	120	5	57.475.000	3	57.475.000	63	99.9	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN	Persentase Peningkatan	%	1	1	607	1	304.970.500	8,2	304.970.500	788	100	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	RENSTRA 2023		ANGGARAN 2023		REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		Keterangan
					Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
					Target		Target		Target		Target		
	LATIHAN PERKOPERASIAN	Kapasitas Koperasi											
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Presentase Koperasi yang berkualitas	%	NA	2	271	2	199.687.000	2	199.687.000	100	99.8	
2.08.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi dari sisi akses modal dan pemasaran	%	0,5	5	4.141	5	1.682.863.300	5,5	1.682.863.300	107	79.4	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	0,2	2.11	1.116	2.11	622.236.573	3,3	622.236.573	156	99.6	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Atas dasar Peraturan Bupati tersebut, tugas pokok Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi adalah: “ **Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang koperasi usaha kecil menengah**”

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program kerja dinas;
2. Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Teknis dibidang perencanaan dan pembinaan terhadap koperasi, usaha kecil dan serta peningkatan kualitas pelaku usaha UMKM.
3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas dibidang kesekretariatan, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan;
5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
7. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Susunan Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi di atur melalui Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2021, tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program
3. **Bidang Pelayanan Izin, Pengawasan dan Penilaian Koperasi**
 - a. Sub koordinator Pelayanan Izin Usaha Koperasi
 - b. Sub Koordinator Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - c. Sub Koordinator Penilaian KSP/USP Koperasi
4. **Bidang Pendidikan Latihan dan Pemberdayaan Koperasi**
 - a. Sub Koordinator Kapasitas dan Kompetensi SDM

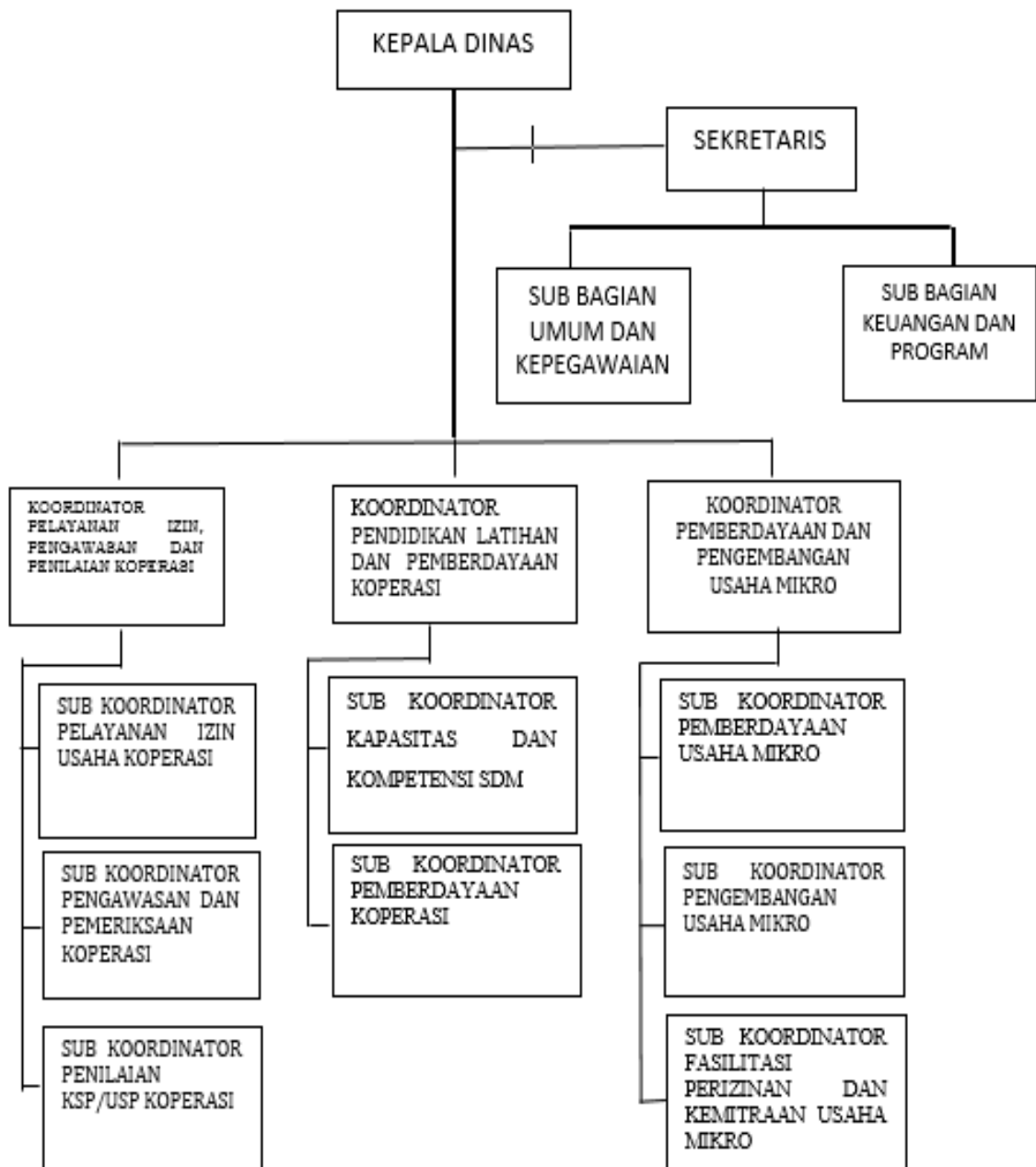


- b. Sub Koordinator Pemberdayaan Koperasi

5. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

- a. Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha Mikro
- b. Sub Koordinator Pengembangan Usaha Mikro
- c. Sub Koordinator Fasilitasi Perizinan dan Kemitraan Usaha Mikro

Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :



Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Sukabumi

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
	Persentase Tingkat Layanan Permohonan Izin KSP		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Koperasi yang Akuntabel		1%	2%	3%	4%	5%	1%	2%	3%	4%	
	Persentase Peningkatan KSP/USP Koperasi yang berpredikat cukup sehat		5%	5%	5%	5%	5%	0	3%	5%	5%	
	Persentase Peningkatan Kapasitas Koperasi		1%	1%	1%	1%	1%	1%	8,2%	1%	1%	



Presentase Koperasi yang berkualitas		1%	2%	3%	4%	5%	1%	2%	3%	4%	
Persentase pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi dari sisi akses modal dan pemasaran		2,5%	5%	7,5%	10%	12,5%	2,5%	5,5%	7,5%	10%	
Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha		1,8%	2,11%	2,6%	3,1%	3,7%	1,8%	3,3%	2,6%	3,1%	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Secara umum permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.8

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Tugas Fungsi	Permasalahan
1	Penyusunan rencana dan program kerja dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya realisasi perencanaan dan program kerja Dinas; 2. Perencanaan idealnya mencakup perencanaan seluruh program dinas:
2.	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Teknis dibidang perencanaan dan pembinaan terhadap koperasi, usaha kecil dan serta peningkatan kualitas pelaku usaha UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peran Lembaga dalam menyusun kebijakan perencanaan untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika masyarakat 2. Adanya ketidaksesuaian anggaran dengan kebutuhan
3.	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas dibidang kesekretariatan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran lembaga dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas pokok dan fungsi yang belum optimal; 2. Masih kurangnya, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap personal pegawai
4.	Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. terbatasnya manajemen administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan; 2. Belum efektifnya kinerja aparatur.
5.	Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum efektifnya peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal; 2. Adanya kesenjangan antara tugas dan fungsi yang dimiliki dengan tuntutan beban kerja sehingga dibutuhkan penambahan kewenangan dan unit kerja.
6.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas	Belum efektifnya sistem pengendalian, pemantauan dan evaluasi dalam pengendalian tugas pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan perizinan;
7.	Pelaporan hasil pelaksanaan tugas	Hasil pelaporan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai input bagi perumusan perencanaan tugas dinas



Aspek strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi :

1. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk
2. Hubungan kemanusiaan yang akrab didalam perusahaan kecil;
3. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja;
4. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis;
5. Terdapatnya dinamisme managerial dan peranan kewirausahaan

Urusan yang menjadi kewenangan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi, berikut identifikasi Permasalahan berdasarkan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi :

1. Keterbatasan KUMKM dalam mengakses peningkatan kapasitas SDM, terbatasnya akses terhadap sumber daya produktif (pembiayaan, Pasar, Teknologi, Informasi dan Legalitas Usaha)
2. Rendahnya jiwa kewirausahaan dan Kurangnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan (struktur organisasi, struktur kekuasaan, dan struktur insentif) yang unik/khas dibandingkan badan usaha lainnya
3. Kurang memasyarakatnya informasi tentang praktek-praktek berkoperasi yang benar (*best practices*) telah menimbulkan berbagai permasalahan mendasar yang menjadi kendala bagi kemajuan KUMKM di Kab. Sukabumi.
4. Data yang berkaitan dengan UMKM belum terintegrasi. Data yang berkaitan dengan jumlah UMKM di Kabupaten Sukabumi kurang lengkap. Perlu dilakukan validasi mengenai data tersebut dan harus terukur kriteria validasinya. Data yang berkaitan dengan UMKM juga perlu dirapikan hingga klasterisasi data supaya dapat digunakan dengan mudah untuk pengembangan kebijakan selanjutnya berkaitan dengan kredit maupun pelatihan dan lain-lain.
5. Daya saing UMKM masih rendah. Teknologi yang dimiliki oleh para pelaku usaha UMKM sebagian besar masih tradisional. Untuk itu, perlu direalisasikan program digitalisasi UMKM. Namun, hal ini terkendala dengan kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM yang belum mempunyai daya saing.
6. Koperasi belum memiliki keunggulan kompetitif. Koperasi saat ini dianggap kuno bagi para milenial. Selain itu, kurangnya kualitas SDM, kelembagaan dan pengawasan koperasi menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi saat ini
7. Adanya ketidaksesuaian anggaran dengan kebutuhan
8. Data yang berkaitan dengan UMKM belum terintegrasi. Data yang berkaitan dengan jumlah UMKM di Kabupaten Sukabumi kurang lengkap. Perlu dilakukan validasi mengenai data tersebut dan harus terukur kriteria validasinya. Data yang berkaitan dengan UMKM juga perlu dirapikan hingga klasterisasi



data supaya dapat digunakan dengan mudah untuk pengembangan kebijakan selanjutnya berkaitan dengan kredit maupun pelatihan dan lain-lain.

9. Daya saing UMKM masih rendah. Teknologi yang dimiliki oleh para pelaku usaha UMKM sebagian besar masih tradisional. Untuk itu, perlu direalisasikan program digitalisasi UMKM. Namun, hal ini terkendala dengan kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM yang belum mempunyai daya saing
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain, permasalahan yang didapat diantaranya :
 - Belum efektifnya peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
 - Adanya kesenjangan antara tugas dan fungsi yang dimiliki dengan tuntutan beban kerja sehingga dibutuhkan penambahan kewenangan dan unit kerja.

Karenanya banyak KUMKM yang tidak dikelola secara profesional dengan menggunakan teknologi dan kaidah ekonomi modern sebagaimana layaknya sebuah usaha. Selain itu, koperasi masih sering dijadikan alat oleh segelintir orang/kelompok, baik di luar maupun di dalam gerakan koperasi itu sendiri, untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau golongannya yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan kepentingan anggota koperasi yang bersangkutan dan nilai-nilai luhur serta prinsip-prinsip koperasi.

Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2025 meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan.
- 2) Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah.
- 3) Pengembangan industri pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan lingkungan.
- 4) Penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial.
- 5) Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah.
- 6) Peningkatan reformasi birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas layanan publik

Tabel . 2.9

Keterkaitan prioritas pembangunan dengan isu strategis Kabupaten Sukabumi

Isu Strategis		Prioritas Pembangunan	
1	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	P1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah,



			serta pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan.
2	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Permasalahan Sosial, dan Ketahanan Bencana	P4	Penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial.
3	Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dengan Peningkatan Keterkaitan Antar Sektor dan Antar Wilayah	P2	Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah.
		P3	Pengembangan industri pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan lingkungan.
4	Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Pendukung Aktivitas Ekonomi dan Pelayanan Dasar	P5	Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah.
5	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	P6	Peningkatan reformasi birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas layanan publik.

Tabel 2.10

Keterkaitan Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, prioritas pembangunan dengan proyek prioritas

Tujuan	Sasaran Strategis	Prioritas Pembangunan	Proyek Prioritas
Visi	Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin		
Misi	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan		
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan	Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar	Penataan Pasar Tradisional (Pasar Semi Modern)



dan pariwisata berkelanjutan	melalui sektor pertanian, kelautan, dan perikanan	dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah	
			Pembangunan pasar induk
			Digitalisasi pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan
			Bantuan permodalan untuk UPK (Unit Pengelola Kegiatan)
			Fasilitasi pengembangan usaha IKM dan UMKM berbasis masjid (BUMI: Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi)
			Pengembangan Kewirausahaan Pesantren (Santripreneur)
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	Pengembangan industri pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan lingkungan	Penataan destinasi wisata unggulan
	Meningkatnya pertumbuhan investasi sektor agribisnis daerah dan pariwisata		Pengembangan wisata budaya
	Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi		Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat melalui BUMDES
			Pengembangan Kewirausahaan Pesantren (Santripreneur)
			Peningkatan kecakapan hidup/Life Skill

2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun Anggaran 2025

Tabel 2.9

Matrik Pemutakhiran Sub kegiatan Tahun Anggaran 2025

NO	SUB KEGIATAN LAMA	SUB KEGIATAN BARU SETELAH PEMUTAKHIRAN
(1)	(2)	(3)
1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
4	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
5	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
8	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
9	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
10	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	
11	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	
12	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
13	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
14	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro



15	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
16	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
17	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
18	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

Tabel 2.10
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2025
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tujuan	Sasaran	Kode	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DALAM RKPD				RAPBD 2025			
			Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja	
					Target	Anggaran Rp			Target	Anggaran Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi Masyarakat berbasis agribisnis dan pariwisata	Meningkatnya Skala Pelaku Ekonomi Mikro	2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			8.239.529.423		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		6.900.776.346
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	57.500.000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%



Tujuan	Sasaran	Kode	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DALAM RKPD				RAPBD 2025				
			Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		
					Target	Anggaran Rp			Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
berkelanjutan		2.17.01 2.01.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	13 Dokumen	57.500.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	13 Dokumen	49.085.200	
		2.17.01 .2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000	
		2.17.01 .2.01.0 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	
		2.17.01 .2.01.0 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000	
		2.17.01 .2.01.0 004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000	
		2.17.01 .2.01.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	



Tujuan	Sasaran	Kode	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DALAM RKPD				RAPBD 2025				
			Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		
					Target	Anggaran Rp			Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	7.053.200	
		2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5.346.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	5.354.813.543	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	4.725.776.246	
		2.17.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	5.354.813.543	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	4.725.776.246	
		2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	5.289.813.543	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	4.674.067.646	
		2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	-	



Tujuan	Sasaran	Kode	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DALAM RKPD				RAPBD 2025				
			Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		
					Target	Anggaran Rp			Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2 17 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
		2 17 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Laporan	9.574.200	
		2 17 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.960.000	
		2 17 01 2.02 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.204.400	
		2 17 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	10.000.000	
		2 17 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	9.970.000	



Tujuan	Sasaran	Kode	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DALAM RKPD				RAPBD 2025				
			Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		
					Target	Anggaran Rp			Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	38.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	27.105.000	
		2 17 01 2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	38.000.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	27.105.000	
		2.17.01 .2.03.0 001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.605.200	
		2.17.01 .2.03.0 002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	
		2 17 01 2.03 0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	
		2 17 01 2.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Dokumen	0	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Dokumen	0	



Tujuan	Sasaran	Kode	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DALAM RKPD				RAPBD 2025				
			Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		
					Target	Anggaran Rp			Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2 17 01 2.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	10.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	4.500.000	
		2 17 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	18.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	17.999.800	
		2 17 01 2.03 0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	umlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	umlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100%	265.775.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100%	24.000.000	
		2 17 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	75 Orang	265.775.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	75 Orang	24.000.000	
		2 17 01 2.05 0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0	
		2 17 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	0	
		2 17 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.500.000	



Tujuan	Sasaran	Kode	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DALAM RKPD				RAPBD 2025				
			Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		
					Target	Anggaran Rp			Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2 17 01 2.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	4.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	4.500.000	
		2 17 01 2.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Persentase ASN yang memiliki kesesuaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	10.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Persentase ASN yang memiliki kesesuaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	5.000.000	
		2 17 01 2.05 0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0 Orang	0	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0 Orang	0	
		2 17 01 2.05 0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0 Laporan	0	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0 Laporan	0	
		2 17 01 2.05 0008	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	0 Orang	0	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	0 Orang	0	
		2 17 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	9.000.000	



Tujuan	Sasaran	Kode	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DALAM RKPD				RAPBD 2025				
			Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		
					Target	Anggaran Rp			Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2 17 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Paket	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Paket	0	
		2 17 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	0 Orang	0	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	0 Orang	0	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	100%	568.618.880	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	100%	414.148.400	
		2 17 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran yang dipenuhi	11 Paket	568.618.880	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran yang dipenuhi	11 Paket	414.148.400	



Tujuan	Sasaran	Kode	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DALAM RKPD				RAPBD 2025				
			Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		
					Target	Anggaran Rp			Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2 17 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediaka	1 Paket	13.889.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediaka	1 Paket	13.885.100	
		2 17 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	112.598.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.000.000	
		2 17 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	15.082.400	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	14.251.100	
		2 17 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	141.559.260	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	191.180.460	
		2 17 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	35.141.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24.601.740	



Tujuan	Sasaran	Kode	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DALAM RKPD				RAPBD 2025				
			Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		
					Target	Anggaran Rp			Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2 17 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	122.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	22.000.000	
		2 17 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0	
		2 17 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.500.000	
		2 17 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	113.343.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	113.230.000	



Tujuan	Sasaran	Kode	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DALAM RKP				RAPBD 2025				
			Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		
					Target	Anggaran Rp			Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2 17 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.505.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.500.000	
		2 17 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	44.773.900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	11.153.500	
		2 17 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan yang dibeli	5 Item	44.773.900	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan yang dibeli	5 Item	11.153.500	



Tujuan	Sasaran	Kode	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DALAM RKPD				RAPBD 2025				
			Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		
					Target	Anggaran Rp			Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2 17 01 2.07 012.17. 01.2.07 .0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	
		2.17.01 .2.07.0 002	Pengadaan Kendaraan Opearsional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Opearsional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	
		2 17 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	33.620.400	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	0	
		2 17 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
		2 17 01 2.07 0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
		2 17 01 2.07 0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak berwujud yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak berwujud yang Disediakan	0 Unit	0	
		2 17 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	



Tujuan	Sasaran	Kode	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DALAM RKPD				RAPBD 2025				
			Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		
					Target	Anggaran Rp			Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2 17 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
		2 17 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	11.153.500	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	11.153.500	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	100%	1.446.039.800,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	100%	1.135.344.000	
		2 17 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis jasa langganan kebutuhan perkantoran yang dipenuhi	3 Jenis	1.446.039.800,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis jasa langganan kebutuhan perkantoran yang dipenuhi	3 Jenis	1.135.344.000	
		2 17 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0	
		2 17 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Retribusi Sampah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	89.921.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Retribusi Sampah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	73.300.000	



Tujuan	Sasaran	Kode	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DALAM RKPD				RAPBD 2025				
			Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		
					Target	Anggaran Rp			Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2 17 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	10.000.000	
		2 17 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.346.118.400,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.052.044.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%	542.900.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%	513.850.000	
		2 17 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	7 Jenis	542.900.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	7 Jenis	513.850.000	
		2 17 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	453.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	428.800.000	



Tujuan	Sasaran	Kode	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DALAM ROKPD				RAPBD 2025				
			Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		
					Target	Anggaran Rp			Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2 17 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	0	
		2 17 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0	
		2 17 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	8.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	4.550.000	
		2 17 01 2.09 0007	Pemeliharaan Asep Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0	Pemeliharaan Asep Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0	
		2 17 01 2.09 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	
		2 17 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	74.900.000	



Tujuan	Sasaran	Kode	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DALAM ROKPD				RAPBD 2025				
			Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		
					Target	Anggaran Rp			Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2.17.01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	0	
		2.17.01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5.600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5.600.000	
		2.17.01 2.09.0 012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0 Ha	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0 Ha	0	
Meningkatnya penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan		2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Tingkat Layanan Permohonan Izin KSP	100%	125.000.000	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Tingkat Layanan Permohonan Izin KSP	100%	43.758.000	
		2.17.02 2.012 17.02 2.01.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/kota	Jumlah Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam yang terverifikasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/Kota	7 Koperasi	125.000.000	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/kota	Jumlah Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam yang terverifikasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/Kota	7 Koperasi	43.758.000	



Tujuan	Sasaran	Kode	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DALAM RKPD				RAPBD 2025				
			Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		
					Target	Anggaran Rp			Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
koperasi		2 17 02 2.01 01	1. Fasilitasi Pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang-cabang	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	45 Unit Usaha	125.000.000	1. Fasilitasi Pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang-cabang	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	45 Unit Usaha	43.758.000	
		2 17 02 2.02	Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Layanan Permohonan Izin KSPJumlah Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/kota	0 Koperas	0	Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Layanan Permohonan Izin KSPJumlah Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/kota	0 Koperas	0	
		2 17 02 2.02 01	2. Fasikitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit Usaha	0	2. Fasikitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit Usaha	0	
		2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN KOPERASI DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Akuntable	4%	300.000.000	PROGRAM PENGAWASAN KOPERASI DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Akuntable	4%	48.992.000	



Tujuan	Sasaran	Kode	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DALAM RKPD				RAPBD 2025				
			Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		
					Target	Anggaran Rp			Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2.17.03.2.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	40 Koperasi	300.000.000	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	40 Koperasi	48.992.000	
		2.17.03.2.01.003	1. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	40 Koperasi	100.000.000	1. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	40 Koperasi	48.992.000	
		2.17.03.2.01.004	2. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	40 Unit Usaha	200.000.000	2. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	40 Unit Usaha	0	
		2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Peningkatan KSP/USP Koperasi yang berpredikat cukup sehat	5%	400.000.000	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Peningkatan KSP/USP Koperasi yang berpredikat cukup sehat	5%	42.250.000	



Tujuan	Sasaran	Kode	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DALAM RPKD				RAPBD 2025				
			Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		
					Target	Anggaran Rp			Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2 17 04 2.01	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	40 Koperasi	400.000.000	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	40 Koperasi	42.250.000	
		2.17.04 .2.01.0 001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	40 Unit Usaha	300.000.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	40 Unit Usaha	42.250.000	
		2 17 04 2.01 03	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	31 Unit Usaha	100.000.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	31 Unit Usaha	0	
		2 17 05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan kapasitas koperasi	1%	312.000.000	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan kapasitas koperasi	1%	312.000.000	
		2.17.05 .2.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota,	Jumlah Koperasi yang telah V perkoperasian untuk koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	80 Koperasi	312.000.000	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota,	Jumlah Koperasi yang telah V perkoperasian untuk koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	80 Koperasi	312.000.000	



Tujuan	Sasaran	Kode	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DALAM ROKPD				RAPBD 2025				
			Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		
					Target	Anggaran Rp			Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2.17.05 .2.01.0 001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	165 Orang	312.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	165 Orang	312.000.000	
		2 17 06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Presentase Koperasi yang berkualitas	4 %	825.000.000	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Presentase Koperasi yang berkualitas	4 %	455.000.000	
		2.17.06 .2.01	Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	100 Koperasi	825.000.000	Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	100 Koperasi	455.000.000	
		2.17.0 6.2.01. 0002	1. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Unit	100.000.000	1. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Unit	15.000.000	



Tujuan	Sasaran	Kode	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DALAM RPKD				RAPBD 2025				
			Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		
					Target	Anggaran Rp			Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2.17.0 6.2.01. 0003	2. Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	4 Keluarga	189.400.000	2. Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	4 Keluarga	50.000.000	
		2.17.06 .2.01.0 004	3. Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	30 Unit Usaha	63.300.000	3. Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	30 Unit Usaha	50.000.000	
		2.17.06 .2.01.0 005	4. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	30 Unit Usaha	132.300.000	4. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	30 Unit Usaha	50.000.000	
		2.17.06 .2.01.0 006	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	0 Unit Usaha	0	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	0 Unit Usaha	0	
		2.17.06 .2.01.0 007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	0 Unit Usaha	0	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	0 Unit Usaha	0	



Tujuan	Sasaran	Kode	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DALAM RKPd				RAPBD 2025				
			Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		
					Target	Anggaran Rp			Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2.17.06 .2.01.0 008	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	100Unit Usaha	100.000.000	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	100Unit Usaha	50.000.000	
		2.17.06 .2.01.0 009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	75 Unit Usaha	240.000.000	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	75 Unit Usaha	240.000.000	
		2 17 07	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan akses permodalan dan pemasaran	10 %	1.550.000.000	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan akses permodalan dan pemasaran	10 %	1.689.240.000	
		2 17 07 2.01	Kegiatan Pemberdayaan dan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan,	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Terfasilitasi dari Sisi Akses Modal dan Pemasaran	280 Unit Usaha	1.550.000.000	Kegiatan Pemberdayaan dan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan,	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Terfasilitasi dari Sisi Akses Modal dan Pemasaran	280 Unit Usaha	1.689.240.000	
		2.17.07 .2.01.0 014	1. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikr	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	160 Orang	200.000.000	1. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikr	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	160 Orang	200.000.000	



Tujuan	Sasaran	Kode	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DALAM RKPD				RAPBD 2025				
			Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		
					Target	Anggaran Rp			Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2.17.07 .2.01.0 003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	90 Unit Usaha	75.000.000,00	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	90 Unit Usaha	75.000.000,00	
		2.17.07 .2.01.0 004	3. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	360 Unit Usaha	300.000.000	3. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	360 Unit Usaha	300.000.000	
		2.17.07 .2.01.0 005	4. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	340 Unit Usaha	300.000.000	4. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	340 Unit Usaha	300.000.000	
		2.17.07 .2.01.0 007	6. Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Orang	0	6. Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Orang	0	
		2.17.07 .2.01.0 008	6. Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Orang	0	6. Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Orang	0	
		2.17.07 .2.01.0 009	7. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	0 Unit Usaha	75.000.000	7. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	0 Unit Usaha	75.000.000	



Tujuan	Sasaran	Kode	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DALAM RKPD				RAPBD 2025				
			Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		
					Target	Anggaran Rp			Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2.17.07 .2.01.0 010	8. Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	0	8. Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	0	
		2.17.07 .2.01.0 011	9. Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	102 Unit Usaha	100.000.000	9. Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	102 Unit Usaha	100.000.000	
		2.17.07 .2.01.0 012	10. Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	0	10. Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	0	
		2.17.07 .2.01.0 013	11. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	0	11. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	0	
		2.17.07 .2.01.0 014	12. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	1500 Unit Usaha	150.000.000	12. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	1500 Unit Usaha	150.000.000	
		2.17.07 .2.01.0 015	13.0Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	160 Unit Usaha	350.000.000	13.0Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	160 Unit Usaha	489.240.000	



Tujuan	Sasaran	Kode	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DALAM RKPd				RAPBD 2025				
			Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		
					Target	Anggaran Rp			Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2 17 08	Pengembangan UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	3.1%	650.000.000	Pengembangan UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	3.1%	650.000.000	
		2 17 08 2.01	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientadsi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	180 Usaha Mikro	650.000.000	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientadsi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	180 Usaha Mikro	650.000.000	
		2.17.08 .2.01.0 002	1. Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	0	1. Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	0	
		2.17.08 .2.01.0 003	2. Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	0 Unit Usaha	0	2. Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	0 Unit Usaha	0	
		2.17.08 .2.01.0 004	3. Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	0 Lembaga	0	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	0 Lembaga	0	
		2.17.08 .2.01.0 005	4. Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	0	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	0	



Tujuan	Sasaran	Kode	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DALAM ROKPD				RAPBD 2025				
			Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Sasaran / program/ kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja		
					Target	Anggaran Rp			Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2.17.08 .2.01.0 006	5. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	305 Unit Usaha	650.000.000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	305 Unit Usaha	650.000.000	
			TOTAL ANGGARAN			12.401.529.423	TOTAL ANGGARAN			10.259.530.459	

5.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi/asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, usulan dari masyarakat yang berhasil dihimpun baik melalui Forum OPD maupun Musrenbang adalah sebagai berikut :

1. Tingginya kebutuhan Masyarakat akan Modal usaha bagi pelaku usaha pemula, sehingga masyarakat memerlukan informasi yang lebih jelas tentang permodalan yang difasilitasi Akses Permodalannya oleh DKUKM Kabupaten Sukabumi
2. Perlunya DKUKM Kabupaten Sukabumi berperan aktif dalam pembinaan Pelaku Usaha dalam segi Manajemen, Teknis dan Akses pasar sehingga para pelaku usaha mampu berdiri sendiri dan berkembang.
3. Daya saing UMKM masih rendah. Teknologi yang dimiliki oleh para pelaku usaha UMKM sebagian besar masih tradisional. Untuk itu, perlu direalisasikan program digitalisasi UMKM. Namun, hal ini terkendala dengan kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM yang belum mempunyai daya saing.

Tabel 2.11
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Sukabumi

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Sukabumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan 2. Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan 3. Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik 4. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran 5. Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran 6. Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan 7. Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi 8. Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan 	6.900.776.346	
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Sukabumi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	49.085.200	
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Sukabumi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	4.555.716.258	
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Sukabumi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	27.105.000	



	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Sukabumi	Jumlah ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	24.000.000	
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Sukabumi	Jumlah Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran yang dipenuhi	444.941.800	
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Sukabumi	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan yang dibeli	11.830.000	
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Sukabumi	Jumlah Jenis jasa langganan kebutuhan perkantoran yang dipenuhi	1.244.677.500	
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Sukabumi	Jumlah sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	508.800.000	
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kab.Sukabumi	Persentase Tingkat Layanan Permohonan Izin KSP	43.758.000	
	1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Sukabumi	Jumlah Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam yang terverifikasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/Kota Usaha Simpan Pinjam yang terverifikasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/Kota	43.758.000	
	2. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Sukabumi	Jumlah Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam yang terverifikasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/Kota	0	
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kab.Sukabumi	Persentase Koperasi yang Akuntabel	48.992.000	
	1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Sukabumi	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	48.992.000	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kab.Sukabumi	Persentase Peningkatan KSP/USP Koperasi yang berpredikat cukup sehat	42.250.000	



	1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Sukabumi	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	42.250.000	
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kab.Sukabumi	Persentase Peningkatan Kapasitas Koperasi	312.000.000	
	1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Sukabumi	Jumlah Koperasi yang telah mengikuti latihan perkoperasian untuk koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	312.000.000	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kab.Sukabumi	Presentase Koperasi yang berkualitas	455.000.000	
	1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Sukabumi	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	455.000.000	
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab.Sukabumi	Persentase pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi dari sisi akses modal dan pemasaran	1.689.240.000	
	1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab.Sukabumi	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Terfasilitasi dari Sisi Akses Modal dan Pemasaran	1.689.240.000	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kab.Sukabumi	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	650.000.000	
	1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kab.Sukabumi	Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	650.000.000	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025, peningkatan daya saing UMKM dan koperasi perlu diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Upaya peningkatan daya saing UMKM yang berkaitan dengan misi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui perbaikan produktivitas dan nilai tambah produk khususnya bagi usaha mikro yang sebagian besar mencakup masyarakat berpendapatan rendah. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, serta perkembangan usahanya secara berkelanjutan.

Di sisi lain, peningkatan daya saing UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui fasilitasi bagi UMKM untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional. Fasilitasi tersebut dapat mencakup peningkatan inovasi, penerapan standardisasi dan sertifikasi kualitas proses produksi dan produk.

Khusus untuk peningkatan daya saing koperasi, upaya-upaya yang perlu dilakukan yaitu mendorong koperasi menjadi lebih mandiri melalui peningkatan dan penguatan partisipasi anggota koperasi untuk mengembangkan usaha bersama. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan peran koperasi sebagai wadah bagi penciptaan efisiensi usaha, peningkatan posisi tawar, dan peningkatan jangkauan pemasaran bagi produk-produk yang dihasilkan oleh anggotanya. Dampak yang diharapkan yaitu peningkatan kesejahteraan anggota koperasi baik secara ekonomi maupun sosial yang selanjutnya akan berkontribusi pada pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan.

Perbaikan tata kelola dan kinerja kelembagaan UMKM dan koperasi menjadi faktor penentu dalam pemanfaatan peluang pengembangan kemitraan, termasuk yang berbasis inovasi, investasi dan ekspor. Penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi juga diharapkan dapat berdampak pada perbaikan struktur pelaku usaha di Indonesia, terutama untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini penting untuk mengoptimalkan pengembangan bidang-bidang usaha tertentu yang akan lebih efisien untuk dijalankan dalam skala kecil dan menengah. UKM juga memiliki kapasitas yang lebih baik dibandingkan dengan usaha mikro terutama dalam merespon peluang investasi, kemitraan atau kerja sama usaha, dan perbaikan peraturan, serta



perubahan pasar yang dinamis.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, bahwa penyusunan dokumen RKPD Kabupaten yang melaksanakan Pilkada harus berpedoman pada RPJPD 2005-2025, mempertimbangkan visi-misi serta program prioritas kepala daerah terpilih dan memperhatikan RKP. Dimana RPJMD tahun 2021-2025 merupakan RPJMD Tahap IV tentang inovasi berkelanjutan pada komoditas unggulan untuk pengembangan perekonomian masyarakat Kabupaten Sukabumi. Dengan visi **“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”**.

Sejalan dengan VISI di atas, terdapat 4 (empat) Misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang akan ditempuhkan, yaitu :

1. Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya dan berdaya saing;
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan;
3. Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah
4. Meningkatkan kualitas pelayanan public yang inovatif, professional dan akuntabel.

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi memiliki peranan dalam menunjang untuk mewujudkan visi tersebut yaitu terdapat pada misi ke - 2 (dua) yaitu **“ Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan”**.

Untuk mengimplementasikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi.

A. Tujuan

Tujuan atas misi ke 2 (dua) adalah *Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata berkelanjutan*.

B. Sasaran



Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakantindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target (2025)
1.	<i>Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi Masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan</i>	Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi Mikro	Persentase pelaku usaha naik kelas	2,50%

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Kunci Keberhasilan/ Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja yang perlu dipertahankan (Hal yang sudah berjalan baik dan perlu dipertahankan), untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi menentukan strategi sebagai berikut:

- a. Melakukan upaya peningkatan SDM dan kualitas produk usaha mikro sesuai dengan pemetaan kebijakan dan intervensi yang dilakukan;
- b. Memetakan kebijakan intervensi yang tepat melalui pendataan pelaku usaha mikro;
- c. Sinergitas Kemitraan Pemasaran Produk antara PUMK dengan Pengusaha Besar/Pasar Modern
- d. Temu Intermediasi antara Pelaku Usaha Mikro dengan Lembaga Keuangan
- e. Modernisasi Legalitas Usaha Berbasis Digital
- f. Peningkatan Kualitas Packaging dan Branding Produk
- g. Seminar Pemasaran Produk Secara Online dan Akses Permodalan bagi Calon Wirausaha Baru
- h. Pengembangan Pemasaran Produk Usaha Mikro Berbasis Modernisasi

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2026
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan 2. Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan 3. Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik 4. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran 5. Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran 6. Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan 7. Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi 8. Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan 	Kab.Sukabumi	100%	6.900.776.346	DAU			7.915.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab.Sukabumi	13 Dokumen	49.085.200	DAU			140.000.000
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab.Sukabumi	2 Dokumen	4.555.716.258	DAU			5.085.000.000
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab.Sukabumi	1 Dokumen	27.105.000	DAU			60.000.000
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Kab.Sukabumi	75 Orang	24.000.000	DAU			50.000.000
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran yang dipenuhi	Kab.Sukabumi	11 Paket	444.941.800	DAU			470.000.00
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan yang dibeli	Kab.Sukabumi	5 Item	11.830.000	DAU			20.000.000
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis jasa langganan kebutuhan perkantoran yang dipenuhi	Kab.Sukabumi	3 Jenis	1.244.677.500	DAU			1.560.000.00
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Kab.Sukabumi	7 Jenis	508.800.000	DAU			530.000.000
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Tingkat Layanan Permohonan Izin KSP	Kab.Sukabumi	100%	43.758.000	DAU			150.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam yang terverifikasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/Kota Usaha Simpan Pinjam yang terverifikasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/Kota	Kab.Sukabumi	7 Koperasi	43.758.000	DAU			150.000.000
	2. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam yang terverifikasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/Kota	Kab.Sukabumi	0	0	DAU			0
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Akuntabel	Kab.Sukabumi	4%	48.992.000	DAU			200.000.000
	1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Sukabumi	40 Koperasi	48.992.000	DAU			200.000.000
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan KSP/USP Koperasi yang berpredikat cukup sehat	Kab.Sukabumi	5%	42.250.000	DAU			300.000.000
	1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Sukabumi	40 Koperasi	42.250.000	DAU			300.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Koperasi	Kab.Sukabumi	1%	312.000.000	DAU			1.095.000.000
	1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah mengikuti latihan perkoperasian untuk koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Kab.Sukabumi	80 Koperasi	312.000.000	DAU			1.095.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Presentase Koperasi yang berkualitas	Kab.Sukabumi	4%	455.000.000	DAU			600.000.000
	1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Kab.Sukabumi	100 Koperasi	455.000.000	DAU			600.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi dari sisi akses modal dan pemasaran	Kab.Sukabumi	10%	1.689.240.000	DAU			1.275.000.000
	1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Terfasilitasi dari Sisi Akses Modal dan Pemasaran	Kab.Sukabumi	280 Usaha Mikro	1.689.240.000	DAU			1.275.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dengan Para Pemangku Kepentingan								
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Kab.Sukabumi	3.1%	650.000.000	DAU			750.000.000
	1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	Kab.Sukabumi	180 Usaha Mikro	650.000.000	DAU			750.000.000

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas, untuk nama program dan kegiatan sendiri seluruhnya mengalami perubahan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2019 ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang merupakan pemutakhiran dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Pemutakhiran yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri merupakan hasil usulan dari pemerintah daerah, serta adanya perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Dalam Rencana Kerja di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi untuk Tahun Anggaran 2025 nama-nama program dan kegiatan yang sesuai dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah terdiri dari 8 (Delapan) program, 13 (Tiga belas) kegiatan dan 102 (Seratus Dua) sub kegiatan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, terdiri dari 8 Kegiatan dan 65 Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** terdiri dari 6 sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** terdiri dari 8 sub kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - e. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD



- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- 3) **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** terdiri dari 7 Sub Kegiatan, yaitu:
- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- 4) **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** terdiri dari 11 sub kegiatan, yaitu :
- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya;
 - c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - e. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - f. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
 - g. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
 - h. Pemindahan Tugas ASN
 - i. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - j. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
 - k. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** terdiri dari 11 sub kegiatan, yaitu :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Penyediaan Bahan/Material
 - h. Fasilitasi Kunjungan Tamu



- i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 6) **Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** terdiri dari 9 Sub Kegiatan yaitu ;
- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Pengadaan Mebel;
 - d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - f. Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - g. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya;
 - h. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
- 7) **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** terdiri dari 4 Sub kegiatan yaitu :
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Retribusi Sampah);
 - c. Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Peralatan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 8) **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,** terdiri dari 11 Sub Kegiatan yaitu :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 - e. Pemeliharaan Mebel;
 - f. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
 - g. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - h. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud



- i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya; dan
 - j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
 - k. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya
2. **Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**, terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu :
1. Kegiatan Penertiban Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dalam Wilayah Keanggotaan dalam Wilayah Kabupaten/Kota, terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang.
 2. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**, terdiri 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu :
1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi.
 - b. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
4. **Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**
1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 2 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
5. **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu :
1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.



6. **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**, terdiri dari 1 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan yaitu :
 1. Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
 - b. Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
 - c. Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
 - e. Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
 - f. Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
 - g. Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
 - h. Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota

7. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**, terdiri dari 1 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan yaitu :
 1. Kegiatan Pemberdayaan dan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, yang terdiri dari 13 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - b. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
 - c. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
 - e. Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
 - f. Pemulihan Usaha Mikro
 - g. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil
 - h. Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro
 - i. Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro
 - j. Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - k. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
 - l. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro;



m. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

8. **Program Pengembangan UMKM**, terdiri dari 1 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil, yang terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Pengembangan Usaha Mikro
 - b. Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
 - c. Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
 - d. Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro
 - e. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi



Tabel 3.3
PROYEK PRIORITAS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUKABUMI

No	PROYEK PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Sub Rincian	PAGU TAHUN 2025	PD PENGAMPU	KETERANGAN
1	Fasilitasi pengembangan usaha IKM dan UMKM (BUMI : Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	- Pertumbuhan Wirausaha Baru Berbasis Pondok Pesantren (BUMI)	200.000.000	DKUKM	
2	Pengembangan Kewirausahaan Pesantren (Santripreneur)				- Workshop UMKM Milenial Berbasis Pesantren (Santripreneur) - Bimbingan Teknis Digitalisasi Berbasis Pondok Pesantren (Santripreneur) - Bimbingan Teknis Manajemen Usaha Berbasis Pondok Pesantren (Santripreneur) - Pendamping Santripreneur	200.000.000	DKUKM	



Tabel 3.4
USULAN MUSRENBANG KECAMATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUKABUMI

No	AKTIFITAS/KAMUS USULAN	SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	Sub Rincian	PAGU TAHUN 2025	PD PENGAMPU	KETERANGAN
1	Pelatihan Kewirausahaan Desa	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pelatihan Kewirausahaan Desa	30.000.000	Dinas Koperasi dan UKM	



Tabel 3.5
PEMETAAN TERKAIT DUKUNGAN TEMATIK KABUPATEN SUKABUMI TA. 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUKABUMI

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pelatihan/Bimtek	Anggaran	Lokasi	Keterangan
1	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Sosialisasi Pembentukan Koperasi (Sasaran Pertanian)	Rp22.350.000	Kec. Kabandungan	
				Sosialisasi Pembentukan Koperasi (Sasaran Perikanan)	Rp22.350.000	Kec. Ciemas	
				Sosialisasi Pembentukan Koperasi (Sasaran Ekonomi Kreatif)	Rp22.350.000	Kec. Surade	
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan usaha Mikro	Workshop Penumbuhan Wirausaha Baru	Rp42.210.000	Kec.Kabandungan, Kec.Ciemas Kec. Surade	
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	- Workshop dan pendampingan pemeriksaan dan kepatuhan koperasi; - Pengawasan Koperasi Pertanian dan Perikanan;	95.070.000	Kec. Ciemas	



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 4.1
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah





BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 merupakan dokumen rencana kegiatan taktis strategis sebagai landasan operasional Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Sukabumi dalam perencanaan penganggaran dan pelaksanaan pada tahun 2025 yang berisi tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan selama tahun 2025.

Berdasarkan uraian Bab-Bab di atas bahwa Rencana Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 menguraikan target kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran demi terwujudnya visi dan misi Dinas Kabupaten Sukabumi dalam menunjang terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Target kinerja yang dapat dicapai dengan optimal apabila didukung dengan anggaran dan sumber daya (sumber daya manusia dan sarana prasarana) yang memadai, apabila kurang memadai maka capaian kinerja kurang optimal sehingga berdampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Rancangan Awal Rancangan Kinerja ini diharapkan dapat terealisasi sesuai dengan yang telah ditentukan sebagai implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025, serta dapat dilaksanakan secara konsisten dengan berpedoman pada aturan dan mekanisme yang berlaku.

Sukabumi, 07 Oktober 2024
Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sukabumi,

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
SIGIT WIDARMADI, A.Md., SE
Pembina Utama Muda